



PASAR PENGADAAN

Barang/Jasa Pemerintah

Dr. Bonatua Silalahi, M.E.

PASAR PENGADAAN

Barang/Jasa Pemerintah

Dr. Bonatua Silalahi, M.E.

PASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Penulis:

Dr. Bonatua Silalahi, M.E.

Desain Cover:

Usman Taufik

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.cpm

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Neneng Sri Wahyuni, S.H.

ISBN:

978-623-500-971-1

Cetakan Pertama:

Juni, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Selamat datang di buku Pasar Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah. Karya ini merupakan hasil dedikasi, penelitian, dan pengalaman panjang dalam dunia pengadaan barang/jasa di sektor pemerintahan. Buku ini hadir sebagai panduan komprehensif yang menggabungkan teori ekonomi, praktik pengadaan, serta regulasi dan kebijakan publik, sehingga dapat memberikan wawasan mendalam bagi para akademisi, praktisi, dan siapa saja yang tertarik memahami dinamika pasar pengadaan.

Buku ini tidak hanya merangkum konsep dan mekanisme pasar dari perspektif klasik ekonomi—mulai dari mikroekonomi, makroekonomi, hingga dasar-dasar penawaran dan permintaan—tetapi juga mengupas secara terperinci proses pengadaan di ranah pemerintahan. Dengan membahas rangkaian mulai dari teori keuangan negara, tender, negosiasi kontrak, hingga sistem manajemen risiko, buku ini menyajikan gambaran praktis dan analitis yang relevan dengan kondisi di lapangan.

Latar Belakang Penciptaan buku ini berakar dari pengalaman nyata sang penulis sebagai seorang praktisi pengadaan berpengalaman serta latar belakang pendidikannya di bidang kebijakan publik dengan fokus pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Sejak tahun 2019, penulis telah melakukan penelitian mendalam untuk memahami berbagai dinamika dan tantangan dalam implementasi pengadaan di sektor publik. Melalui penelitian tersebut, terungkap berbagai temuan penting yang menjadi acuan dalam upaya menyempurnakan sistem pengadaan agar menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Keterlibatan langsung dalam proses pengadaan serta eksplorasi regulasi dalam buku ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan praktik dan kebijakan pengadaan di Indonesia.

Di bab-bab awal, pembaca akan diajak menelusuri dasar-dasar teori pasar yang menjadi fondasi pemahaman terhadap seluruh proses pengadaan. Selanjutnya, terdapat analisis mendalam mengenai implementasi pengadaan di Indonesia, dilengkapi dengan data dan studi kasus dari berbagai metode pelaksanaan—mulai dari swakelola,

e-tendering, hingga pengadaan khusus dalam situasi darurat. Pembahasan kebijakan publik dan perbandingan dengan praktik di beberapa negara juga disajikan, memberikan perspektif global dalam mengelola pasar pengadaan.

Saya berharap, melalui setiap halaman dan wawasan yang tertuang dalam buku ini, pembaca dapat menemukan inspirasi dan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana pasar pengadaan beroperasi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Semoga buku ini menjadi sumber referensi yang berharga dalam upaya menciptakan sistem pengadaan barang/jasa yang lebih berkelanjutan, transparan, dan responsif terhadap tantangan zaman.

Jakarta, Juni 2025

Dr. Bonatua Silalahi, M.E.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB 1 PASAR	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pertumbuhan Ekonomi.....	10
C. Sejarah Pasar.	12
D. Hukum Pasar.....	13
E. Bentuk dan Struktur Pasar.....	18
F. Pelaku Pasar.....	23
G. Jenis Pasar Kebutuhan Pemerintah	24
H. Hubungan Antara Pasar.....	26
BAB 2 PENGADAAN	27
A. Teori Keuangan Negara.	27
B. Teori Pengadaan Barang Publik.	29
C. Pengaruh Belanja PBJ Terhadap Ekonomi Makro	39
BAB 3 KEBIJAKAN PUBLIK PENGADAAN	43
A. Kebijakan Publik.....	43
B. Kebijakan Pengadaan Luar Negeri.....	45
C. Kebijakan Terkait Pengadaan	60
D. Kebijakan Pengadaan Indonesia.....	100
BAB 4 PASAR PBJ INDONESIA	211
A. Struktur Pasar PBJ.....	211
B. Profil PBJ	217
BAB 5 UNSUR PEMBENTUK PASAR PBJ	273
BAB 6 KOMPONEN PASAR PBJ	287
A. Pengadaan Umum	287
B. Pengadaan Khusus.....	300
BAB 7 PASAR PERSAINGAN PBJ	313
A. Matriks Persaingan di Pasar PBJ.....	313
B. Valuasi Pasar Persaingan PBJ.....	315

BAB 8 KAJIAN	319
A. Sumbangsih Terhadap PDB	319
B. Definisi 7 Prinsip Pengadaan	320
C. Swakelola.....	323
D. RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik	324
E. Kebijakan Pemerintah	331
PENUTUP.....	345
DAFTAR PUSTAKA.	348
TENTANG PENULIS.....	355

DAFTAR SINGKATAN

NO	SINGKATAN	PERPANJANGAN
1	APBD	Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah
2	APBN	Anggaran Pendapatan & Belanja Negara
3	APIP	Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah
4	BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
5	BUMN	Badan Usaha Milik Negara
6	DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
7	EMAT	<i>Economically Most Advantageous Tender</i>
8	E-Procurement	<i>Electronic Procurement</i>
9	HPS	Harga Perkiraan Sendiri
10	JDIH	Jaringan dokumentasi informasi & hukum
11	K/L	Kementerian/Lembaga
12	KAK	Kerangka Acuan Kerja
13	Keppres	Keputusan Presiden
14	KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
15	KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
16	KPBU	Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha
17	LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
18	PA	Pengguna Anggaran
19	PBJ	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
20	PD	Pemerintahan Daerah
21	PDB	Produk Domestik Bruto
22	PDN	Produk Dalam Negeri
23	Pemda	Pemerintah Daerah
24	Perpres	Peraturan Presiden

25	Perpres/12/2021	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
26	Perpres/16/2018	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
27	Perpres/46/2025	Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
28	Perpres/54/2010	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
29	PM	Peraturan Menteri
30	Pokja	Kelompok Kerja Pemilihan
31	PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
32	PPMSE	Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
33	PPU	Peraturan Perundang-Undangan
34	RUU	Rancangan Undang-Undang
35	SDM	Sumber Daya Manusia
36	SIKAP	Sistem Informasi Kinerja Penyedia
37	SiRUP	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
38	SPPBJ	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
39	SPSE	Sistem Pengadaan secara Elektronik
40	TKDN	Tingkat Komponen Dalam Negeri
41	UKPBJ	Unit Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
42	UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
43	UN	<i>United Nations</i>
44	WTO	<i>World Trade Organization</i>

1

PASAR

A. PENDAHULUAN

Dalam ilmu ekonomi, pemisahan antara mikroekonomi dan makroekonomi merupakan dasar untuk memahami berbagai aspek kegiatan ekonomi dalam skala yang berbeda. Berikut adalah penjelasan kedua cabang tersebut.

❖ Mikroekonomi

Mikroekonomi mempelajari perilaku dan keputusan ekonomi yang diambil oleh unit-unit dasar seperti individu, rumah tangga, dan perusahaan. Fokus utamanya adalah bagaimana konsumen memutuskan untuk membeli barang dan jasa, serta bagaimana perusahaan menetapkan produksi dan harga. Mikroekonomi menganalisis mekanisme pasar melalui konsep penawaran dan permintaan, elastisitas, utilitas, dan teori produksi. Karena memusatkan perhatian pada level “bagian kecil” dari perekonomian, mikroekonomi sering disebut sebagai studi tentang pasar dan perilaku individual. Kajian mikroekonomi membantu dalam memahami bagaimana harga terbentuk di pasar, bagaimana sumber daya dialokasikan secara efisien, serta bagaimana interaksi antara pembeli dan penjual menentukan struktur pasar yang ada.

Ciri-ciri Mikroekonomi:

1. Analisis Individu: Pendekatan yang mengamati perilaku konsumen dalam menentukan pilihan, keputusan pembelian, serta strategi perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan.
2. Struktur Pasar: Mempelajari berbagai bentuk struktur pasar seperti persaingan sempurna, pasar *monopolis*, oligopoli, dan pasar monopolistik, sehingga dapat menjelaskan perbedaan dalam penetapan harga dan *out-put*.

2

PENGADAAN

Pada bab ini sangat penting bagi kita menjelaskan keterkaitan antara Pengadaan dan Pasar dalam konteks Ilmu Ekonomi sebagaimana dijelaskan pada Bab I.

A. TEORI KEUANGAN NEGARA.

Pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah (G) merupakan komponen atau komposisi ketiga dari PDB. Pass & Lowes (1988) berpendapat bahwa, pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran investasi dari setiap level pemerintah untuk menyediakan barang & jasa publik (kesehatan, pendidikan, pertahanan/keamanan, jalan raya, & lain sebagainya), memasarkan barang & jasa, & biaya-biaya sosial (pengangguran, pensiun, & lain sebagainya). Adapun pengeluaran pemerintah memiliki dampak pengganda (*multiplier effect*) bagi permintaan agregat, hal ini lah yang menjadi salah satu alasan mengapa intervensi pemerintah dalam perekonomian perlu dilakukan khususnya pada masa-masa krisis. Secara definisi efek pengganda (*multiplier effect*) merupakan perubahan pendapatan agregat yang disebabkan akibat perubahan pada pengeluaran atau belanja pemerintah (Mankiw, 2007).

Terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan oleh perubahan pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian, seperti: (i). Pengembangan fungsi pemerintahan akan mendorong peningkatan belanja publik untuk membiayai kegiatan administrasi & regulasi perekonomian; (ii). pembangunan masyarakat industrial yang modern akan meningkatkan tekanan politik untuk kemajuan sosial & meminta peningkatan cadangan untuk urusan sosial di dalam melaksanakan kegiatan industri; (iii). Peningkatan pengeluaran publik akan melebihi peningkatan pendapatan nasional & akan mendorong ekspansi kegiatan di sektor publik. Selain itu, khususnya di negara yang maju, peran sektor publik di dalam kegiatan ekonomi akan tumbuh secara terus menerus

3

KEBIJAKAN PUBLIK PENGADAAN

Pada bab ini, setelah kita mengetahui hubungan Pengadaan dan Pasar maka sekarang tibalah saatnya mengetahui bagaimana sesungguhnya kebijakan dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan (PPU) terkait Pengadaan di Indonesia maupun Internasional.

A. KEBIJAKAN PUBLIK

Peristilahan kebijakan biasanya digunakan terkait dengan tindakan atau kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya. Kebijakan biasanya dituangkan dalam berbagai bentuk PPU. Kebijakan publik erat hubungannya dengan administrasi pemerintahan dimana Hukum merupakan salah satu instrumen kebijakan publik dan PPU berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut (Sihombing & Noor, 2024).

Terdapat beberapa definisi mengenai kebijakan publik. Dunn (1994) mengatakan bahwa, kebijakan publik merupakan serangkaian alternatif yang saling berhubungan & diciptakan oleh pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut kepentingan publik seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, & lain-lain. Anderson (1997) berpendapat bahwa, kebijakan publik merupakan suatu tindakan pemerintah yang memiliki target & relatif konsisten yang berkonsentrasi pada suatu masalah. Adapun Menurut Parsons (2001) kebijakan publik merupakan suatu aksi yang dilakukan oleh pemerintah, partai politik, & pengambil kebijakan untuk kepentingan masyarakat luas. Adapun menurut Dye (2013), kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Berdasarkan beberapa definisi yang dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa, kebijakan publik merupakan sebuah keputusan pemerintah yang berisikan suatu tindakan ataupun tidak yang bertindak untuk kepentingan publik.

4

PASAR PBJ INDONESIA

Dari Bab sebelumnya sudah jelas bahwa PBJ Pemerintah Indonesia dapat disebut Pasar yang di dalamnya bertemu Penjual/Produsen dan Pembeli/Konsumen. Bagaimanakah bentuk atau jenis Pasar tersebut akan dikupas pada bagian ini.

A. STRUKTUR PASAR PBJ.

Setelah penjabaran bagaimana teori pasar pada Bab I, lalu kebijakan terkait PBJ yang ada di Negara Indonesia pada Bab III maka kita tibalah saatnya melihat bagaimana sesungguhnya struktur Pasar PBJ yang tercipta berdasarkan Perpres/16/2018 junto Perpres/12/2021, junto Perpres/46/2025 sebagaimana dijabarkan pada BAB sebelumnya.

Pasar PBJ di Indonesia

Kita telah melihat terdapat 5 jenis pasar berdasarkan struktur persaingannya disebutkan pada Bab I yaitu Pasar Persaingan Sempurna, Monopolistik, Oligopoli, Duopoli dan Monopoli. Berdasarkan kajian materi muatan pasal per pasal dari peraturan presiden tersebut maka mari kita melihat apakah kelima pasar persaingan tersebut terlihat di kebijakan Presiden.

Berikut adalah pengelompokan jenis pasar dalam pengadaan barang/jasa berdasarkan struktur persaingan klasik—yaitu persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, duopoli, dan monopoli—disertai contoh dan implikasi ekonominya. Meskipun Perpres/46/2025 tidak menyebut istilah-istilah ini secara eksplisit, kita dapat menafsirkan mekanisme dan kondisi pengadaan yang tercermin dalam regulasi tersebut sebagai berikut:

5

UNSUR PEMBENTUK PASAR PBJ

Menurut Kotler & Armstrong (2017), untuk dapat dikatakan sebagai pasar, suatu tempat atau entitas harus memenuhi beberapa unsur utama yaitu:

1. Penjual dan Pembeli: Pasar memerlukan pihak yang menawarkan barang atau jasa (penjual) dan pihak yang membutuhkan atau ingin membeli barang atau jasa tersebut (pembeli).
2. Barang atau Jasa: Harus ada produk atau jasa yang diperdagangkan di pasar.
3. Transaksi: Terdapat proses pertukaran antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun melalui perantara.
4. Harga: Harus ada mekanisme penentuan harga, baik itu melalui negosiasi, lelang, atau berdasarkan sistem harga tetap.
5. Lokasi: Walaupun pasar tidak selalu berbentuk fisik (contohnya: pasar *on-line*), tetap harus ada "platform" untuk interaksi, baik fisik maupun virtual.

Dari kajian seluruh ketentuan yang tertulis di dalam Perpres/16/2018 dapat terlihat bahwa kelima unsur utama tersebut di atas sudah terpenuhi sehingga PBJ dapat dikategorikan sebagai Pasar, adapun ulasanya sebagai berikut:

1. Penjual dan Pembeli: Pada pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa PBJ dilakukan melalui dua cara yaitu Swakelola dan Penyedia. Menurut ketentuan umum bahwa yang dimaksud :
 - 1) PBJ melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh K/L/PD; K/L/PD lain, Ormas, Pokmas.
 - 2) Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

6

KOMPONEN PASAR PBJ

Melanjutkan teori Komponen Utama Teori Struktur Pasar yang disebutkan pada BAB I, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sesungguhnya komponen Pasar PBJ di negara kita berdasarkan kebijakan Pengadaan, melalui kajian terhadap Perpres/16/2018 junto Perpres/46/2025 beserta aturan pelaksanaan yang dikeluarkan LKPP maka diperoleh karakteristik komponen utama pasar PBJ sebagaimana dijabarkan dibawah ini.

A. PENGADAAN UMUM

❖ Pasar Elektronik (E-Marketplace)

- a. Jumlah Penjual dan Pembeli:
 - Penjual: Pelaku usaha yang terdaftar dalam Katalog Elektronik atau Toko Daring (Pasal 70).
 - Pembeli: Instansi pemerintah, termasuk kementerian, lembaga, dan perangkat daerah (Pasal 69).
- b. Jenis Produk:

Produk dan jasa standar yang telah terdaftar dalam Katalog Elektronik, seperti barang dengan spesifikasi tetap dan risiko rendah (Pasal 72A dan Pasal 70 ayat 2).
- c. Kemudahan Masuk dan Keluar Pasar:
 - Penjual harus melalui proses verifikasi oleh LKPP untuk masuk ke sistem e-marketplace (Pasal 70 ayat 3).
 - Pembeli dapat dengan mudah mengakses barang/jasa melalui katalog dan toko daring.
- d. Kontrol atas Harga:

Harga barang/jasa dalam pasar ini telah ditentukan berdasarkan mekanisme pasar atau pengaturan sistem (Pasal 72A).

7

PASAR PERSAINGAN PBJ

Dari penjabaran pada bab sebelumnya sudah cukup jelas bahwa Pelaku Pasar PBJ terdapat hanya satu pembeli/konsumen yaitu Pemerintah sedangkan disisi Penjual/produsen ternyata sangat banyak yaitu Pemerintah itu sendiri, Ormas, Pokmas dan pelaku Usaha. Untuk yang terakhir yaitu Pelaku Usaha sangat jelas padanya terjadi persaingan sesama Pelaku Usaha, bagaimana bentuknya di Pasar PBJ akan kita terangkan lebih lanjut.

A. MATRIKS PERSAINGAN DI PASAR PBJ

Berdasarkan ciri-ciri komponen utama Pasar PBJ yang diuraikan pada Bab VI, secara pendekatan konseptual untuk pengelompokan jenis-jenis pengadaan (sesuai Peraturan Presiden dan peraturan LKPP) khusus dari aspek struktur persaingan pasar yang diuraikan pada bab II, maka diperoleh kelompok pasar sebagai berikut:

1. Pasar Persaingan Sempurna

Indikasi: Banyak penyedia, produk/layanan yang standar dan homogen sehingga peserta tender atau penawaran cenderung banyak, dan tidak ada satupun yang memiliki kekuatan pasar signifikan.

- Katalog elektronik Pengadaan dengan menggunakan katalog elektronik menampilkan daftar barang yang sudah ternormalisasi dan tersedia dari banyak pemasok.
- Toko daring Mirip dengan katalog elektronik, metode toko daring mengandalkan platform elektronik yang menawarkan produk standar dari berbagai penyedia.
- Tender Proses tender (konvensional) umumnya terbuka untuk banyak peserta yang menawarkan barang/jasa dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, sehingga menggambarkan kompetisi yang tinggi.

8

KAJIAN

Akhirnya setelah kita bahas panjang lebar dari mulai pendahuluan, lalu memperkenalkan konsep ekonomi hingga akhirnya menganalisis Pasar PBJ Indonesia baik secara kebijakan terkait maupun empiris praktik yang terjadi di lapangan, maka kini tibalah kita pada bagian akhir berupa yang dapat dianggap sebagai suatu kesimpulan, saran ataupun masukan bagi para pemangku kebijakan.

A. SUMBANGSIH TERHADAP PDB

PDB, atau Produk Domestik Bruto, adalah salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Dalam bahasa Inggris, PDB dikenal sebagai *Gross Domestic Product* (GDP). Secara sederhana, PDB mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu negara selama periode tertentu, biasanya satu tahun.

Pada negara Eropa sebagaimana disinggung pada Bab III, disebutkan bahwa terdapat ukuran persentase tahunan dari nilai pengadaan dalam PDB dimana untuk Negara Jerman kira-kira 10-15% (2018) dan Negara Perancis sebesar 15% (2013). Lantas bagaimana dengan Indonesia, berikut hasil rekapitulasinya:

Tabel 8. Persentase Belanja Pengadaan Indonesia terhadap PDB.

No.	Item	Tahun Anggaran (Triliun)				Rata-Rata
		2023	2022	2021	2020	
1	Anggaran Belanja PBJ	1.152,2	1.057,6	1.106,4	1.027,1	1.101,1
2	PDB (BPS)	20.892,4	19.588,1	16.976,8	15.443,4	18.225,1
3	Persentase PBJ terhadap PDB	6%	5%	7%	7%	6%

Sumber: Penulis (diolah).

PENUTUP

Sebagai penutup, kami mencoba mengusulkan bagaimana cara menyelenggarakan PBJ agar dapat semaksimal mungkin meningkatkan PDB Negara, sehingga dapat dipakai sebagai instrumen Kesejahteraan Rakyat. Sebagaimana dijelaskan pada Bab II tentang Pengaruh Belanja PBJ terhadap Ekonomi Makro sebagaimana rumus sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Di mana:

Y = Produk Domestik Bruto (PDB) atau *out-put* nasional.

C = Konsumsi rumah tangga.

I = Investasi oleh sektor swasta.

G = Belanja pemerintah (termasuk belanja barang dan jasa).

X - M = Ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Maka, dalam konteks PBJ, pemerintah memiliki potensi besar untuk meningkatkan komponen G serta memberikan dampak positif pada investasi dan konsumsi. Berikut adalah beberapa langkah strategis khusus terkait PBJ yang dapat diambil pemerintah:

1. **Memperbesar Belanja Barang/Jasa Pemerintah:** Semakin besar Nilainya maka semakin tinggi efek Multiplier-nya, semisal sampai 15% dimana saat ini kita baru sekitar 6%. Multiplier Effect akan semakin besar jika cara pengadaanya sebesar-besarnya diserahkan kepada Swasta (Penyedia) dengan menekan sekuat-kuatnya Swakelola yang dikerjakan sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil, maupun yang dibantu Ormas/Pokmas.
2. **Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Pengeluaran Pemerintah (G):** Dengan menerapkan sistem pengadaan secara elektronik—seperti e-tendering, e-purchasing, dan e-katalog—proses pembelian barang dan jasa menjadi lebih transparan dan efisien. Hal ini tidak hanya memastikan nilai manfaat maksimal (value for money) dari anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga mengurangi kebocoran dan inefisiensi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ahmad, S. A., Issa, U. H., Farag, M. A. & Abdelhafez, L. M. (2013) 'Evaluation of risk factors affecting time & cost of construction projects in Yemen', *International Journal of Management (IJM)*, 4(5), pp. 168-178.
2. Anderson, J. E. (1997). Public Policy Making: An Introduction - Third Edition. Boston: Houghton Mifflin Company.
3. Baumol, W. J. (1982). *Contestable Markets and the Theory of Industry Structure*. Harcourt Brace Jovanovich.
4. Bergman, M. A., & Lundberg, S. (2013). Tender evaluation & supplier selection methods in public procurement. *Journal of purchasing & supply management*, 19(2), 73-83.
5. Blanchard, O. (2021). *Macroeconomics* (8th ed.). Pearson.
6. Chude, N., & I., C. D. (2013). Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Nigeria . *International Journal of Business & Management Review*, 1(4) , 64-71.
7. Common Market for Eastern & Southern Africa (2011) Trainers of Trainers (TOT) Workshop, Addis Ababa, 25 July to 5 August, CS/EPRCP/TCPE/VI/1.
8. Davison, B. & Sebastian, R.J. (2011) 'A detailed analysis of the relationship between contract administration problems & contract types', *Journal of Public Procurement*, Spring, Vol. 11, No. 1, pp.108–126.
9. DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC.
10. Dunn, W. N. (1994). Public Policy Analysis: An Introduction. New York: Pearson New International Edition.
11. Dye, T. R. (2013). Understanding Public Policy, 15th Edition. New York: Pearson New International Edition.
12. Ellram, L.M. (1993) 'Total cost of ownership: elements & implementation', *The International Journal of Purchasing & Materials Management*, Vol. 29, No. 4, pp.3–11.

TENTANG PENULIS



Dr. Bonatua Silalahi, M.E.
(Bonatua.766hi@gmail.com)

Pria kelahiran Medan, Sumatera Utara pada tahun 1977, menyelesaikan pendidikan S-2 sampai S-3 di Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, dan pendidikan S-1 dari Universitas Sumatera Utara (USU).

Aktif meneliti terkait pengadaan, dimana penelitian tesisnya berjudul: **Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa untuk meningkatkan Value for Money** sedangkan Penelitian disertasinya berjudul: **Kebijakan Publik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Penanganan Bencana**. Berbagai penelitian dan tulisannya telah ditayangkan di berbagai jurnal bereputasi internasional termasuk Scopus antara lain:

1. *Political Economy - Development: Environment e-Journal* Vol 13, Issue 28, March 17, 2025.
2. *Political Institutions: Federalism & Sub-National Politics e-Journal* Vol 19, Issue 12, March 12, 2025.
3. *The Journal of Ontario International Development Agency* Vol. 18, Issue 04: March 7, 2025.
4. *Law, Policy & Economics of Technical Standards e-Journal Sponsored by: University of Utah S.J. Quinney College of Law* Vol. 11, No. 9: May 22, 2023.
5. *Political Economy: Government Expenditures & Related Policies e-Journal* Vol. 16, No. 42: Apr 28, 2023.

6. *Comparative Political Economy: Fiscal Policy e-Journal* Vol. 10, No. 96: Apr 20, 2023.
7. *Political Economy - Development: Public Service Delivery e-Journal* Vol. 11, No. 54: Mar 29, 2023.
8. *Political Institutions: Parties, Interest Groups & Other Political Organizations e-Journal* Vol. 15, No. 17: Feb 28, 2022.
9. *Political Economy: Government Expenditures & Related Policies e-Journal* Vol. 15, No. 26: Feb 23, 2022.
10. *Political Economy – Development: Public Service Delivery e-Journal* Vol. 10, No. 20: Feb 23, 2022.

Kesehariannya saat ini bekerja sebagai Konsultan Kebijakan Publik, Peneliti Independent serta aktif menulis artikel tentang kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada media on-line: Kebijakan Publik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah menerbitkan Buku Edisi Uni Eropa berjudul *Implementation Analysis of Government Procurement Policy to Increase Value for Money* (ISBN-10: -978 :13-ISBN ;9994988344 .(9994988341

Selain itu Penulis juga aktif di berbagai organisasi komunitas profesi maupun sosial seperti sebagai Ketua Bidang Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Periode Tahun 2023-2028, Anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), dan Kordinator Bidang Ikatan Alumni USU Jakarta dan sekitarnya periode 2024-2029.

PASAR PENGADAAN

Barang/Jasa Pemerintah

Buku ini mengkaji secara menyeluruh dinamika pasar dan praktik pengadaan barang/jasa pemerintah, menggabungkan teori ekonomi, kebijakan, dan praktik pengadaan untuk membangun sistem yang transparan, kompetitif, dan berkelanjutan. Ditujukan bagi praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan, buku ini menyajikan kerangka analisis untuk memahami serta mengembangkan pasar pengadaan yang efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

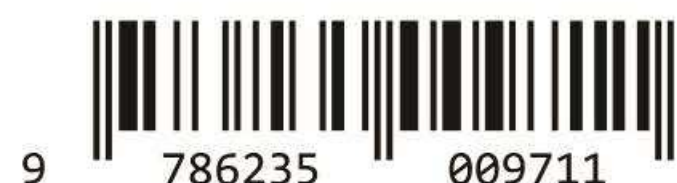
Bab I membahas dasar ekonomi pasar, termasuk konsep mikro dan makroekonomi, serta struktur dan pelaku pasar. Bab II mengulas teori dan praktik pengadaan, mencakup proses tender, pemilihan pemasok, dan dampak ekonomi dari belanja PBJ. Bab III meninjau kebijakan publik dan hukum antimonopoli, serta membandingkan praktik pengadaan Indonesia dengan negara lain.

Bab IV fokus pada struktur pasar PBJ di Indonesia, tipe-tipe pasar, serta metode pengadaan dari 2020–2023. Bab V dan VI mengupas unsur pasar PBJ, termasuk e-marketplace, pasar internasional, dan model pelaksanaan pengadaan. Bab VII menganalisis kompetisi dalam pasar PBJ melalui matriks persaingan dan valuasi pasar.

Bab VIII menilai kontribusi PBJ terhadap PDB, membahas isu-isu kontemporer seperti kebijakan impor dan pengadaan berkelanjutan, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis tinjauan internasional. Buku ditutup dengan lampiran daftar pustaka dan profil penulis.

Ekonomi & Perbankan

ISBN 978-623-500-971-1



9 786235 009711